

BAB III

KEDUDUKAN NU DALAM KONTEKS POLITIK KEBANGSAAN

A. Sejarah Berdirinya NU

Nahdlatul Ulama terlahir bukan dari ruang kosong. NU terlahir dalam suasana sosial politik keagamaan dan kebangsaan yang sangat ketat dengan persinggungan kelompok kelompok dari luar. Dalam segi sosial keagamaan berhadapan dengan fundemantalis dan ekstrimis. Dalam konteks nasionalis kebangsaan NU berhadapan dengan kelompok kominis yang juga telah mengadakan perlawanan kepada pemerintah hindia belanda. Nama NU mampu memposisikan diri ditengah tengah dinamika masyarakat dan bangsa indonesia secara melebur dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lebih lanjut dalam memahami sejarah NU sebagai berikut.

1. Pesantren Sebagai Cikal Bakal

Pondok Pesantren adalah lembaga tertua di tanah air. Lazimnya dalam pesantren, seseorang ulama' dikelilingi para santri yang mempelajari agama islam sekaligus menjadi penerus penyebaran agama islam dengan bahasa lain, santri dididik menjadi kader penerus perjuangan agama islam serta dilatih untuk menjadi pelayan masyarakat. Oleh karena itu, di samping

pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam, lembaga perjuangan islam juga lembaga pelayan masyarakat.⁴¹

Ketika modernisme islam hadir di tanah air yang ingin memajukan pendidikan islam dengan mengadakan lembaga pendidikan diluar pesantren, sekaligus meninggalkan pesantren (karena dianggap tidak mampu mengejar kemajuan zaman), maka ulama pengasuh pesantren menolak keras hal tersebut. Mereka bertekat, betapapun sengsara lambat dan beratnya pesantren harus diperbaiki, tidak dengan meninggalkannya.⁴²

Hal itu bukan tanpa alasan, karena pesantren sudah berhasil mendidik para kader islam yang menyatu dengan masyarakat. Demikian pula pesantren sudah menjadi kiblat serta panutyan dengan segala keterbelakangannya. Apa artinya maju sendiri umat masih tertinggal, bukankah itu suatu dosa. Jauh sebelum modernisme islam datang, para ulama pengasuh pesantren berdiri sendiri sendiri, belum ada ikatan formal struktural organisatoris. Hubungan antar ulama dilangsungkan dengan silaturahmi tradisional seperti pertemuan pertemuan Haul, Imtihan, Walimah dan sebagainya. Bahkan dipererat dengan kekerabatan melalui besanan.⁴³

⁴¹ Zainal Abidin Amir dan Imam Anshori Salch, *NU dan Sockarno*, (Jogjakarta: LKIS, 2012), 78

⁴² *Ibid.*, 79

⁴³ *Ibid.*, 81

Keinginan untuk mendirikan organisasi formal struktural bukan tidak ada, tapi pertumbuhannya sangat lambat. Hal itu dimulai dengan kelompok-kelompok pengajian keliling dengan berbagai nama dan berdiri sendiri. Lompatan penting yang dilakukan para ulama dalam berorganisasi waktu itu adalah dengan terbentuknya kelompok diskusi taswirul afkar disurabaya yg dipelopori oleh K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansur. Walaupun akhirnya pendiri kelompok tersebut berpencar, kiai Mas Mansur masuk muhammadiyah dan KH. Wahab Hasbullah mendirikan nahdhatul ulama⁴⁴.

2. Posisi dan Fungsi NU

NU sebagai organisasi yang didirikan oleh para ulama pengasuh pesantren yang sekian banyaknya dan sekian luas pengaruhnya, tentu dimaksudkan untuk menempatkan posisi dan fungsi ulama sedemikian penting ditengah tengah masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di NU. Sehingga posisi dan fungsi ulama tidak hanya seperti dalam arisan. Jika ditelisik lebih jauh dalam rumusan khittah NU, posisi dan fungsi ulama itu dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

a. Dalam Agama

Sebagaimana pada alenia kedua butir mukaddimah khittah NU disebutkan: NU sebagai jam'iyah diniyah merupakan wadah bagi para

⁴⁴ Muchith Muzadi, *NU Dalam Prespektif Sejarah Dan Ajaran*, (Khalista : Surabaya, 2006), 32.

⁴⁵ *Ibid.*, 34

ulama dan pengikut pengikutnya yang didirikan pada 16 rajab 1344 H. atau 31 januari 1926 M., dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam yang berhaluan al-Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah serta menganut salah satu madhab empat; imam abu hanifah an nu'man, imam malik bin anas, imam muhammad bin indris asy-syafi'i dan imam ahmad bin hanbal, guna mempersatukan langkah para ulama dalam melakukan kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, ketinggiana harkat dan martabat manusia.⁴⁶

Juga pada alinea ketiga mukaddimah khittah terdapat kalimat: NU yang demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram adil dan sejahtera.

b. Dalam Organisasi

Sebagaimana disebutkan dalam alinea pertama dari butir dan fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama (butir 7 khittah NU): dalam rangka melakukan iktiyar, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu, berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan

⁴⁶ *Ibid.*, 35

bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Karena pada dasarnya NU adalah jam'iyah diniyah yang membawakan keagamaan, maka ulama sebagai mata rantai pembawa fatwa keagamaan islam *al-Ahlu wa al-Jamaah*, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing jalanya organisasi.⁴⁷

c. Dalam Kehidupan Berbangsa.

Sebagaimana disebutkan pada alenia 1,2,3,4 dan 5 butir NU dan kehidupan berbangsa (butir 8 dari khittah NU): sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa indonesia, NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa indonesia. NU secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan serta ikut aktif dalam menyusun serta perumusan perumusan pancasila sebagai dasar negara.⁴⁸

Keberadaan NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan NU dan segenap warganya senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang dirindahi Allah SWT. Karenanya, setiap warga NU

⁴⁷ *Ibid.*, 36

⁴⁸ Zainal Abidin Amir dan Imam Anshori Saleh, *NU dan Sockarno*, 80

harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi pancasila dan UUD 45.⁴⁹

Sebagai organisasi keagamaan, NU adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat islam indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (al-ukhuwah) dan toleransi (at-tasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan warga negara baik sesama umat islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan atau agama lain untuk sama sama mewujudkan cita cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.⁵⁰

Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pendidikan, NU senantiasa berusaha secara sadar untuk menciptakan warga negara yang menyadari hak dan kewajiban terhadap bangsa dan negara, NU sebagai jam'yyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan manapun. Setiap warga NU adalah warga negara yang mempunyai hak hak politiknya, harus dilakukan secara bertanggungjawab, sehingga dengan demikian, dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, mampu

⁴⁹ *Ibid.*, 81

⁵⁰ *Ibid.*, 82

mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.⁵¹

Membicarakan sejarah bangsa Indonesia tidak akan lepas dari NU (Nahdlatul Ulama). Bagaimana NU dalam peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan keutuhan NKRI dan bagaimana latar belakang lahirnya ormas terbesar di dunia Nahdlatul Ulama (NU) ini lahir.⁵²

3. Tiga hal melatarbelakangi lahirnya NU

Ada dua alasan yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926:⁵³

a. Motif Agama.

Bahwa Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan Agama Allah di Nusantara, meneruskan perjuangan Wali Songo. Terlebih Belanda-Portugal tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen-Katolik dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris-misionaris Kristiani ke berbagai wilayah.

b. Motif Nasionalisme.

⁵¹ *Ibid.*, 83

⁵² *Ibid.*

⁵³ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 54.

NU lahir karena niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni Kebangkitan Para Ulama. NU pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya. Tapi, kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis.

Pada 1924, para pemuda pesantren mendirikan Syubbanul Wathon (Pemuda Tanah Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang salah satu tokohnya adalah pemuda gagah, Muhammad Yusuf (KH. M. Yusuf Hasyim). Selain itu dari rahim NU lahir laskar-laskar perjuangan fisik, di kalangan pemuda muncul laskar-laskar Hizbullah (Tentara Allah) dengan panglimanya KH. Zainul Arifin seorang pemuda kelahiran Barus Sumatra Utara 1909, dan di kalangan orang tua Sabilillah (Jalan menuju Allah) yang di komandoi KH. Masykur.

Sejarah mencatat, meski bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, 53 hari kemudian NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) nyaris

mencaplok kedaulatan RI. Pada 25 Oktober 1945, 6.000 tentara Inggris tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan itu dipimpin Brigadir Jenderal Mallaby, Panglima Brigade ke-49 (India). Penjahah Belanda yang sudah hengkang pun membonceng tentara sekutu itu.⁵⁴

Praktis, Surabaya genting. Untung, sebelum NICA datang, Soekarno sempat mengirim utusan menghadap Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari di Pesantren Tebuireng, Jombang. Melalui utusannya, Soekarno bertanya kepada Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari: “Apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam, atau membela al-Qur'an. Sekali lagi, membela tanah air?”

Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari yang sebelumnya sudah punya fatwa jihad kemerdekaan bertindak cepat. Dia memerintahkan KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan para Kiai lain untuk mengumpulkan para Kiai se-Jawa dan Madura. Para Kiai dari Jawa dan Madura itu lantas rapat di Kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama, Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, dipimpin Kiai Wahab Hasbullah pada 22 Oktober 1945. Pada 23 Oktober 1945, Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari atas nama Pengurus Besar NU mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah, yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, 57

⁵⁵ Abdul Ghaffar Karim, *Metamorfosis NU, Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), 38.

Ada tiga poin penting dalam Resolusi Jihad itu:⁵⁶

- a) Setiap muslim – tua, muda, dan miskin sekalipun- wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia.
- b) Pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada.
- c) warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati.

Umat Islam wajib hukumnya membela tanah air. Bahkan, haram hukumnya mundur ketika kita berhadapan dengan penjajah dalam radius 94 km (jarak ini disesuaikan dengan dibolehkannya Qashar Shalat). Di luar radius itu dianggap fardhu kifayah (kewajiban kolektif, bukan fardhu ‘ain, kewajiban individu).⁵⁷

Fatwa jihad yang ditulis dengan huruf pegon itu kemudian digelorakan Bung Tomo lewat radio. seruan saja, warga Surabaya dan masyarakat Jawa Timur yang keberagamaannya kuat dan mayoritas NU merasa terbakar semangatnya. Ribuan Kiai dan santri dari berbagai daerah -seperti ditulis M.C. Ricklefs, mengalir ke Surabaya. Meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang dikenang sebagai hari pahlawan. Para Kiai dan pendekar tua membentuk barisan pasukan non regular Sabilillah yang dikomandani oleh KH. Maskur. Para santri dan pemuda berjuang

⁵⁶ *Ibid.*, 40

⁵⁷ *Ibid.*, 41

dalam barisan pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh H. Zainul Arifin. Sementara para Kiai sepuh berada di barisan Mujahidin yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah. Perang tak terelakkan sampai akhirnya Brigadir Jenderal Mallaby tewas.

c. Motif Mempertahankan Fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah.

NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (Para Pengikut Sunnah Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf Pengikut Nabi-Sahabat), sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru (tidak dikenal zaman Rasul-Sahabat-Salafus Shaleh/ajaran ahli bid'ah). Pembawa ajaran-ajaran bid'ah yang sesat (bid'ah madzmumah) menurut ulama al-Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah adalah sebagai berikut:⁵⁸

1) Kaum Khawarij

Kaum Khawarij dengan imam/pemimpinnya Abdullah bin Abdul Wahab ar-Rasabi yang muncul di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib Ra. yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, sehingga ciri khas mereka mudah menuduh orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan ajarannya sebagai kafir. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib Ra. pun dicap kafir karena dianggap

⁵⁸ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 60

berdosa besar mau menerima tawaran tahkim/perdamaian yang diajukan oleh pemberontak Muawiyah Ra.

2) Kaum Syi'ah

Kaum Syi'ah, lebih-lebih setelah munculnya sekte syi'ah Rafidhah dan Ghulat. Tokoh pendiri Syi'ah adalah Abdullah bin Saba' seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan menyebarkan ajaran Wishoya, bahwa kepemimpinan setelah Nabi adalah lewat wasiat Nabi Saw. Dan yang mendapatkan wasiat adalah Ali bin Abi Thalib Ra. Dan Abu Bakar, Umar dan Utsman termasuk perampok jabatan.

3) Aliran Mu'tazilah

Aliran Mu'tazilah yang didirikan oleh seorang tabi'in yang bernama Wasil bin Atho', ciri ajaran ini adalah menafsirkan al-Qur'an dan kebenaran agama ukurannya adalah akal manusia, bahkan mereka berpendapat demi sebuah keadilan Allah harus menciptakan al-manzilah baina al-manzilataini, yakni satu tempat di antara surga dan neraka sebagai tempat bagi orang-orang gila.

4) Faham Qodariyyah

Faham Qodariyyah yang pendirinya adalah Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan ad-Dimasyqi keduanya murid Wasil bin Atho' dan keduanya dijatuhi hukuman mati oleh Gubernur Irak dan Damaskus karena menyebarkan ajaran sesat (bid'ah), ciri ajarannya adalah

manusia berkuasa penuh atas dunia ini, karena tugas Allah telah selesai dengan diciptakannya dunia, dan bertugas lagi nanti ketika kiamat datang

5) Aliran Mujassimah atau kaum Hasyawiyyah.

Ciri aliran ini menjasmanikan Allah (menyerupakan Allah dengan makhluk) yang diawali dengan menafsirkan al-Qur'an secara lafdziy dan tidak menerima ta'wil, sehingga sehingga mengartikan yadullah adalah Tangan Allah⁵⁹. Bahkan mereka sanggup mengatakan, bahwa pada suatu ketika, kedua mata Allah kesedihan, lalu para malaikat datang menemuiNya dan Dia (Allah) menangisi (kesedihan) berakibat banjir Nabi Nuh As. sehingga mataNya menjadi merah, dan 'Arsy meratap hiba seperti suara pelana baru dan bahwa Dia melampaui 'Arsy dalam keadaan melebihi empat jari di segenap sudut⁶⁰.

6) Ajaran-ajaran Mujaddid

Ajaran-ajaran Para Pembaharu Agama Islam (Mujaddid) yang dimulai dari Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M atau abad ke 7 – 8 H / 13 – 14 M yakni 700 tahun setelah Nabi Saw. wafat atau

⁵⁹ Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Fath al-Baari, Juz XX* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2006), 354.

⁶⁰ *Ibid.401.*

500 tahun dari masa Imam asy-Syafi'i). Beliau mengaku penganut madzhab Hanbali, tapi anehnya beliau justru menjadi orang pertama yang menentang sistem madzhab. Pemikirannya lalu dilanjutkan muridnya Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah. Aliran ini kemudian dikenal dengan nama aliran salafi-salafiyah yang mengaku memurnikan ajaran kembali ke al-Qur'an dan Hadits, tetapi di sisi lain mereka justru mengingkari banyak hadits-hadits Shahih (*inkarus sunnah*). Mereka ingin memberantas bid'ah tetapi pemahaman tentang bid'ahnya melenceng dari makna bid'ah yang dikehendaki Rasulullah Saw., yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama salaf Ahlussunnah wal Jama'ah. Mereka juga membangkitkan kembali penafsiran al-Qur'an-Sunnah secara lafdziy.⁶¹

Golongan Salafi ini percaya bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah hanya bisa diartikan secara tekstual (apa adanya teks) atau literal dan tidak ada arti majazi atau kiasan di dalamnya. Pada kenyataannya terdapat ayat al-Qur'an yang mempunyai arti haqiqi dan ada juga yang mempunyai arti majazi, yang mana kata-kata Allah Swt. harus diartikan sesuai dengannya. Jika kita tidak dapat membedakan di antara keduanya maka kita akan menjumpai beberapa

⁶¹ *Ibid.*,405

kontradiksi yang timbul di dalam al-Qur'an. Maka dari itu sangatlah penting untuk memahami masalah tersebut.⁶²

Dengan adanya keyakinan bahwa seluruh kandungan al-Qur'an dan Sunnah hanya memiliki makna secara tekstual atau literal dan jauh dari makna majazi atau kiasan ini, maka akibatnya mereka memberi sifat secara fisik kepada Allah Swt. (umpama Dia Swt. mempunyai tangan, kaki, mata dan lain-lain seperti makhlukNya). Mereka juga mengatakan terdapat kursi yang sangat besar ('Arsy) dimana Allah Swt. duduk (sehingga Dia membutuhkan ruangan atau tempat untuk duduk) di atasnya. Terdapat banyak masalah lainnya yang diartikan secara tekstual. Hal ini telah membuat banyak fitnah di antara ummat Islam, dan inilah yang paling pokok dari mereka yang membuat berbeda dari madzhab yang lain. Salafisme ini hanya berjalan atas tiga komposisi yaitu; Syirik, Bid'ah dan Haram. (Penjelasan rincinya akan dibahas kemudian).⁶³

Munculnya Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke 12 H / 18 M, seorang pembaharu agama (mujaddid) yang lahir di Ayibah lembah Najed (1115-1201 H/1703-1787 M) yang mengaku sebagai penerus ajaran Salafi Ibnu Taimiyyah dan kemudian mendirikan madzhab Wahabi-Wahabiyyah. Ia pun mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jama'ah karena meneruskan

⁶² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 63.

⁶³ *Ibid.*, 64

pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal yang diterjemahkan oleh Ibnu Taimiyyah, tapi sebagaimana pendahulunya, Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya pun layaknya kaum Khawarij yang mudah mengkafirkan para ulama yang tidak sejalan dengan dia, bahkan sesama madzhab Hanbali pun ia mengkafirkannya. Di sini, kita akan mengemukakan beberapa pengkafiran Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beberapa tokoh ulama al-Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah yang tidak sejalan dengan pemikiran sektenya.⁶⁴

Dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada Syaikh Sulaiman bin Sahim –seorang tokoh madzhab Hanbali pada zamannya– Ia (Muhammad Abdul Wahhab) menuliskan: “Aku mengingatkan kepadamu bahwa engkau bersama ayahmu telah dengan jelas melakukan perbuatan kekafiran, syirik dan kemunafikan! Engkau bersama ayahmu siang dan malam sekuat tenaga telah berbuat permusuhan terhadap agama ini! Engkau adalah seorang penentang yang sesat di atas keilmuan. Dengan sengaja melakukan kekafiran terhadap Islam. Kitab kalian itu menjadi bukti kekafiran kalian!”⁶⁵.

Dalam sebuah surat yang dilayangkan untuk Ibnu Isa –yang telah melakukan argumentasi terhadap pemikirannya –Muhammad Abdul Wahhab

⁶⁴ Fathor Rohman JM, *NU dan Politik Kebangsaan di Indonesia, dalam (ed) “Sarung dan Demokrasi; Dari Nu Untuk Peradaban Keindonesiaan*, (Surabaya: Khalista, 2008), 86

⁶⁵ Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al-‘Ashimi an-Najdy, *ad-Durar as-Saniyah jilid 10* (Jedah: al-Ma’ahid, 2000), 31.

menvonis sesat para pakar fikih (fuqoha) secara keseluruhan. Ia (Muhamad Abdul Wahhab) menyatakan: (Firman Allah); “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah”. Rasul dan para imam setelahnya telah mengartikannya sebagai ‘Fikih’ dan itu yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai perbuatan syirik. Mempelajari hal tadi masuk kategori menuhankan hal-hal lain selain Allah. Aku tidak melihat terdapat perbedaan pendapat para ahli tafsir dalam masalah ini”⁶⁶.

Berkaitan dengan Imam Fakhrur Razi –pengarang kitab Tafsir al-Kabir, yang bermadzhab Syafi’i Asy’ary– ia (Muhamad Abdul Wahhab) mengatakan: “Sesungguhnya Razi tersebut telah mengarang sebuah kitab yang membenarkan para penyembah bintang.”⁶⁷ Betapa kedangkalan ilmu Muhamad bin Abdul Wahhab terhadap karya Imam Fakhrur Razi. Padahal dalam karya tersebut, Imam Fakhrur Razi menjelaskan tentang beberapa hal yang menjelaskan fungsi gugusan bintang dalam kaitannya dengan fenomena yang berada di bumi, termasuk berkaitan dengan bidang pertanian. Namun Muhammad bin Abdul Wahhab dengan keterbatasan ilmu terhadap ilmu perbintangan telah menvonisnya dengan julukan yang tidak layak, tanpa didasari ilmu yang cukup.

⁶⁶ *Ibid.*, 59

⁶⁷ *Ibid.*, 355

Dari berbagai pernyataan di atas maka jangan kita heran jika Muhammad bin Abdul Wahhab pun mengkafirkan –serta diikuti oleh para pengikutnya (Wahhabi)–para pakar teologi (mutakallimin) Ahlusunnah secara keseluruhan⁶⁸. bahkan ia (Muhamad Abdul Wahhab) mengaku-ngaku bahwa kesesatan para pakar teologi tadi merupakan konsensus (ijma’) para ulama dengan mencatut nama para ulama seperti adz-Dzahabi, Imam Daruquthni dan al-Baihaqi.⁶⁹

Tokoh Pembaharu Agama (mujaddid) lain penerus faham salafi Ibnu Taimiyyah adalah muncul pada abad ke 19 di Afghanistan yang bernama Jamaluddin al-Afghani (1838-1898). Ajarannya diteruskan oleh muridnya dari Mesir di abad ke 19 – 20 M yang bernama Muhammad Abduh (1849-1905). Pemikiran Muhammad Abduh menyebar ke berbagai penjuru dunia lewat tulisannya yang dimuat dalam majalah al-Manar. Setelah beliau wafat pada tahun 1905, majalah al-Manar diteruskan oleh muridnya yang bernama Muhammad Rasyid Ridla (1865-1935). Kumpulan tulisan Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridla ini kemudian dibukukan menjadi Tafsir al-Manar.⁷⁰

Dalam perkembangannya aliran Salafi-Wahabi pun terpecah dalam banyak faksi (kelompok) dengan karakteristiknya masing-masing, tergantung

⁶⁸ *Ibid.*, 53

⁶⁹ Fathor Rohman JM, *NU dan Politik Kebangsaan Di Indonesia, Dalam “Sarung Dan Demokrasi; Dari Nu Untuk Peradaban Keindonesiaan*, 87

⁷⁰ *Ibid.*, 89

pada imam mana yang diikutinya. Tokoh ulama Wahabi yang menjadi rujukan dan panutan saat ini adalah Muhammad Nashiruddin al-Albani seorang dosen Ilmu Hadits di Universitas Islam Madinah yang lahir pada tahun 1915 dan wafat 1 Oktober 1989. Ia dipuja-puja kaum Wahabi-Salafi bahkan dianggap lebih alim dari Imam Bukhori, karena ia men-Takhrij/mengomentari beberapa haditsnya Imam Bukhori (194 – 256 H).⁷¹

Ajaran Salafi-Wahabi ini masuk ke Indonesia mulanya dipelopori oleh antara lain: darwis, Syaikh Akhmad Soorkati, A. Hasan dan H.O.S. Cokroaminoto sebagaimana perincian berikut:⁷²

- a. Dibawa oleh seorang tokoh pembaharu agama (mujaddid) asal Yogyakarta yang bernama Darwis yang aktif dan rutin mengikuti pemikiran Muhammad Abduh-M. Rasyid Ridla lewat majalah al-Manar dan ajaran Wahabi. Ia kemudian dikenal dengan nama KH. Ahmad Dahlan yang pada 18 Nopember 1912 mendirikan organisasi keagamaan Muhammadiyah. Walaupun kenyataannya dalam amaliyah sehari-hari selama hidupnya KH. Ahmad Dahlan lebih dekat kepada madzhab Syafi'i. Namun sepeninggal beliau terjadi modernisasi total dari para penerusnya.

⁷¹ *Ibid.*, 71

⁷² *Ibid.*, 91

- b. Syaikh Akhmad Soorkati (1872-1943) seorang tokoh pembaharu (mujaddid) asal Sudan yang kalah bersaing dalam Jami'at al-Khair di negaranya, kemudian Hijrah ke Indonesia dan tahun 1914 di Betawi mendirikan organisasi al-Irsyad.
- c. Di Bandung pun muncul Mujaddid yang bernama A. Hasan yang juga dikenal sebagai Hasan Bandung atau Hasan Bangil yang tahun 1927 meneruskan organisasi PERSIS (Persatuan Islam) yang didirikan pada 1923 oleh KH. Zam Zam Palembang.
- d. H.O.S. Cokroaminoto dengan PSII (Persatuan Syarikat Islam Indonesia).

Apa yang Menyebabkan Aliran "Islam Baru" Dapat Menyebarkan dengan Cepat? Muhammad bin Abdul Wahab pernah menguji coba ajarannya kepada penduduk Bashrah, tetapi karena mereka adalah penganut fanatik ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, maka usahanya bagaikan menabrak batu karang. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab menetap di Dir'iyah dan Pangeran Muhammad ibn Saud (dari Dir'iyah Najed) setuju untuk saling mendukung dengan Wahhabi.

Keluarga/Klan Saud dan pasukan/lasykar Wahhabi berkembang menjadi dominan di semenanjung Arabia, pertama menundukkan Najed, lalu memperluas kekuasaan mereka ke pantai timur dari Kuwait sampai Oman. Orang Saudi juga membawa tanah tinggi 'Asir di bawah kedaulatan mereka

dan pasukan Wahhabi mereka mengadakan serangan di Irak dan Suriah, dan menguasai kota suci Shi'ah, Karbala tahun 1801.

Pada tahun 1802, pasukan Saudi-lasykar Wahhabi merebut kota Hijaz (Jeddah, Makkah, Madinah dan sekitarnya) di bawah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan kemarahan Daulah Utsmaniyah Turki, yang telah menguasai kota suci sejak tahun 1517, dan membuat Daulah Utsmaniyah bergerak. Tugas untuk menghancurkan Wahhabi diberikan oleh Daulah Utsmaniyah Turki kepada raja muda kuat Mesir, Muhammad Ali Pasha.⁷³

Muhammad Ali mengirim pasukannya ke Hijaz melalui laut dan merebutnya kembali. Anaknya, Ibrahim Pasha, lalu memimpin pasukan Utsmaniyah ke jantung Najed, merebut kota ke kota. Akhirnya, Ibrahim mencapai ibukota Saudi, Dir'iyah dan menyerangnya untuk beberapa bulan sampai kota itu menyerah pada musim dingin tahun 1818. Ibrahim lalu membawa banyak anggota klan Al Saud dan Ibn Abdil Wahhab ke Mesir dan Ibukota Utsmaniyah, Istanbul Turki, dan memerintahkan penghancuran Diriyah, yang reruntuhannya kini tidak pernah disentuh kembali. Pemimpin Saudi terakhir, Abdullah bin Saud dieksekusi di Ibukota Utsmaniyah, dan kepalanya dilempar ke air Bosphorus. Sejarah kerajaan Saudi Pertama

⁷³ Masmuni, *NU 2 Versi, dari Pergulatan Menuju Kejayaan*, (Bandung: Pustaka Publisher, 2008), 72.

berakhir, namun, Wahhabi dan klan Al Saud hidup terus dan mendirikan kerajaan Saudi Kedua yang bertahan sampai tahun 1891.⁷⁴

Perselingkuhan agama - ambisi kekuasaan - kepentingan asing dimulai dari wilayah Najed. Ketika lasykar Wahhabi - klan Al Saud yang dipimpin Abdul Aziz Ibnu Sa'ud menyusun kekuatan kembali disertai dukungan persenjataan mesin dari sekutu lamanya, Inggris (antek Amerika). Maka awal tahun 1900-an mereka menyerang kembali kota Hijaz yang saat itu dipimpin Raja Syarif Husain. Ketika itu Hijaz hanya dibantu oleh Daulah Utsmaniyyah Turki yang sudah mulai lemah, dan akhirnya pada tahun 1924 ketika kekuasaannya sudah mengecil Raja Syarif Husain mengasingkan diri ke kepulauan Cyprus dan kekuasaannya diserahkan pada putranya yang bernama raja Syarif Ali.⁷⁵

Raja Syarif Ali membuat kota-kota pertahanan baru, tapi lasykar Wahhabi-klan Ibnu Sa'ud dengan persenjataan canggih berhasil mengepung semua kota, hingga yang tersisa hanya pertahanan di pelabuhan Jeddah. Pada ahir 1925 ketika lasykar Wahhabi-klan Ibnu Sa'ud berhasil menguasai pelabuhan Jeddah, maka Raja Syarif Ali menyerah pada pemberontak. Dari tahun 1925 inilah Hijaz dengan dua kota suci Makkah dan Madinah dikuasai oleh keluarga Sa'ud dan Wahhabi. Dan ahirnya tepat tanggal 23 September

⁷⁴ *Ibid.*, 73

⁷⁵ *Ibid.*

tahun 1932, Hijaz berubah nama menjadi al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyah, Kerajaan Arab Sau'di, yang dinisbatkan kepada nama leluhurnya yakni Al Sa'ud, dengan Ibukotanya Riyadh. Dan tahun 1943 muncullah ARAMCO (Arabian-American Company) yang mengeksplorasi minyak Arab Saudi. Dari sejarah itulah, mengapa sampai saat ini Arab Saudi selalu tidak bisa bersuara selain seperti suara Amerika, sekalipun harus berbeda dengan negara-negara Islam lainnya.

Jatuhnya Hijaz ke tangan pemberontak pada 1925 tidak hanya berakibat perubahan pemeritahan, tapi juga merombak total praktek-praktek keagamaan di Hijaz dari yang semula *Ahlussunnah wal Jama'ah* menjadi faham Wahhabi. Seperti larangan bermadzhab, larangan ziarah ke makam-makam pahlwan Islam, larangan merokok, larangan berhaji dengan cara madzhab. Bahkan makam Rasulullah Saw., sahabat dan tempat-tempat bersejarah pun berencana akan digusur karena dianggap sebagai biang/tempatnya kemusyrikan.⁷⁶

Ketika aliran Salafi-Wahhabi berkembang di Dir'iyah maupun Najed itu belumlah membuat risau umat Islam dunia. Tetapi ketika mereka menguasai pusat Islam yakni dua kota suci di Hijaz, maka hal ini menimbulkan dampak yang luar biasa, termasuk dalam persebarannya ke seluruh dunia. Melihat perubahan ajaran yang terjadi di Hijaz, maka hampir

⁷⁶ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 68.

semua umat Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di seluruh dunia memprotes rencana pemerintahan baru di Hijaz yang ingin memberlakukan asas tunggal, yakni madzhab Wahhabi.⁷⁷

Protes luar biasa pun muncul di Indonesia, ketika bulan Januari 1926 ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia berkumpul di Surabaya untuk membahas perubahan ajaran di dua kota suci. Dari pertemuan tersebut lahirlah panita Komite Hijaz yang diberi mandat untuk menghadap raja Ibnu Sa'ud guna menyampaikan masukan dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia. Akan tetapi karena belum ada organisasi induk yang menaungi delegasi Komite Hijaz, maka pada tanggal 31 Januari 1926, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah Indonesia kembali berkumpul dan membentuk organisasi Induk yang diberi nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Para Ulama) dengan Rois Akbar Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari.⁷⁸

Susunan delegasi Komite Hijaz NU untuk menghadap raja Ibnu Sa'ud adalah sebagai berikut Penasehat : KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Masyhuri Lasem, KH. Kholil Lasem Ketua : KH. Hasan Gipo, Wakil Ketua : H. Shaleh Syamil Sekretaris : Muhammad Shadiq Pembantu : KH. Abdul

⁷⁷ *Ibid.*, 70

⁷⁸ *Ibid.*

Halim Materi pokok yang hendak disampaikan langsung ke hadapan raja Ibnu Sa'ud adalah:⁷⁹

1. Meminta kepada raja Ibnu Sa'ud untuk memberlakukan kebebasan bermadzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
2. Meminta tetap diramaikannya tempat bersejarah karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid.
3. Mohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Makkah maupun tentang Syekh.
4. Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya undang-undang tersebut.
5. Jam'iyyah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap raja Ibnu Sa'ud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut.

B. Politik NU dalam Konteks Kebangsaan di Indonesia

1. Politik partisipasi

Semua warga negara mempunyai hak dalam berpolitik. Hak inilah yang kemudian menjadi bentuk partisipasi politik sebagai warga negara. KH. Sahal mahfudh mengklasifikasi partisipasi politik menjadi dua *Low politic*

⁷⁹ Masmuni, *NU 2 Versi, Dari Pergulatan Menuju Kejayaan*, 75.

(Politik tingkat rendah) dan high politic (*politik tingkat tinggi*). Low politic inilah yang diperankan oleh setiap warga negara secara individu termasuk warga NU sedangkan high politic inilah yang diperankan NU secara organisatoris.⁸⁰

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi⁸¹:

- a. kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- b. kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- c. lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
- d. partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
- e. golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk

⁸⁰ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 9

⁸¹ *Ibid.*

hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

2. Mode Partisipasi Politik

Mode partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar : *Conventional* dan *Unconventional*. *Conventional* adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950 an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (*environmentalist*), gerakan perempuan gelombang 2 (*feminist*), protes mahasiswa (*students protest*), dan teror.⁸²

3. Bentuk Partisipasi Politik

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:⁸³

- a. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi

⁸² *Ibid.*, 11

⁸³ *Ibid.*

- calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
- b. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
 - c. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
 - d. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
 - e. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuaipan, ancaman,

pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.⁸⁴

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson belumlah relatif lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu. Misalnya, Thomas M. Magstadt menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi:⁸⁵

- a. Opini publik;
- b. Polling;
- c. Pemilihan umum; dan
- d. Demokrasi langsung.

Lebih lanjut sebagaimana yang dijelaskan oleh Fathor Rohman JM, NU merupakan organisasi yang berbasis agama terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Kiprahnya dalam pembangunan bangsa Indonesia tidak diragukan lagi. Banyak buku yang telah mengulas perjalanan yang sangat panjang, mulai pra kemerdekaan Indonesia hingga jaman reformasi. Meskipun lahir setelah Muhammadiyah NU sudah termasuk tua yakni lebih dari 82 tahun⁸⁶.

⁸⁴ Masmuni, *NU 2 Versi, Dari Pergulatan Menuju Kejayaan*, 82.

⁸⁵ *Ibid.*, 83

⁸⁶ Fathor Rohman JM, *NU dan Politik Kebangsaan di Indonesia*, dalam (ed) "*Sarung dan Demokrasi; dari NU Untuk Peradaban Keindonesiaan*", (Surabaya: Khalista, 2008), 55.

Melihat perjuangan yang unik dan eksotik serta ketekunannya dalam membimbing dengan arus bawah, nu menjadi pusat perhatian para peneliti, baik yang dari dalam maupun luar negeri. Berbagai sisi dari kehidupan NU menjadi fenomena yang mendatangkan rasa antusias para peneliti⁸⁷. Mulai dari interaksi inrapersonal para warganya, tradisionalitas, progresifitas, anak mudanya, keunikan pendidikannya, perjuangan pemberdayaan masyarakat tradisional, dan yang tak kalah pentingnya adalah kiprah perpolitikan di indonesia⁸⁸.

Banyak hal yang diperjuangkan NU untuk memajukan bangsa indonesia mulai dari penguatan ekonomi⁸⁹, politik, budaya, hingga intelektualitas warga NU. Pada awalnya NU bukanlah subyek kajian yang menarik perhatian para peneliti, namun pasca NU deklaratif menyatakan kembali ke Khittah 1926 pada moment mukhtamar NU yang ke 27 disitubondo pada 1984, kajian kajian tentang NU bagaikan jamur di musim hujan.

Dari kajian kajian tersebut menjadi jelas sumbangan sumbangn NU terhadap pembangunan peradaban bangsa ini sejak awal. Sebab berdirinya

⁸⁷ Abdul Ghaffar Karim, *Metamorfosis NU, Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), 76.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ A. Efendy Choiric, “*Pelopor Gerakan Kebangsaan, Rapuh di Ekonomi*”, dalam www.gp-ansor.org. diakses pada, 2 Januari 2014

NU tidak lepas dari kondisi bangsa Indonesia yang mengitarinya pada saat itu. Sejarah berdirinya NU diwarnai dengan fakta keihlasan. Adalah KH. Wahab Hasbullah (1888-1971), seorang kiai yang dinamis, berjiwa muda, berwawasan luas, berusaha berjuang merapatkan barisan kelompok kiai dan masyarakat tradisional pada awal abad ke 20 untuk bangkit dari berbagai macam keterpurukan dan ketertindasan. Meskipun dalam NU, KH Wahab Hasbullah tidak sepopuler KH. Hasyim Asy'ari, tapi beliau dikenal sebagai "macan" perkasa yang disegani kawan maupun lawan dalam dunia gerakan NU sejak awal. Beliau telah menorehkan tinta emas sejarah dalam melahirkan, memupuk dan membesarkan NU⁹⁰.

Politik kebangsaan NU dari awal berdirinya telah terintegrasi dengan bangsa ini adapun pilar-pilar kekuatan politik kebangsaan adalah sebagai berikut:

a. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tertua di Indonesia. Keberadaannya yang unik dan khas Indonesia. Artinya, lembaga yang serupa pesantren tidak ditemui di luar Indonesia. Apalagi hal itu dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada di pendidikannya. Pada pra kemerdekaan, pesantren merupakan tempat basis perlawanan terhadap penjajah. Setelah kemerdekaan selain tetap menjadi pusat pendidikan

⁹⁰Masmuni, *NU 2 Versi, Dari Pergulatan Menuju Kejayaan*, 5.

islam tradisional, pesantren juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat secara sosial, budaya dan ekonomi. Karena itu pesantren juga bisa di sebut lembaga sosial⁹¹.

b. Semangat Politik NU

Dapat dikatakan bahwa sumbangan terbesar NU terhadap perkembangan peradaban bangsa indonesia adalah dalam bidang politik. Sebagai organisasi yang tumbuh dari pergulatan politik, NU banyak mengambil andil dalam sejarah perpolitikan di indonesia. Sejak awal NU tampil sebagai “bidan” lahirnya republik indonesia dan menjaga NKRI yang tidak diragukan lagi. NU terlibat dalam pembentukan laskar Hizbullah, Jundullah dan sabilillah pada kurun waktu 1945-1949 (sebagai embrio lahirnya TNI) untuk membebaskan republik indonesia⁹².

Pada tahun 1945, NU mengeluarkan resolusi jihad yang membakar semangat perjuangan para pembela republik⁹³. Melalui wakilnya di PPKI, KH. A. Wahid Hasyim, NU menolak “piagam jakarta” demi persatuan bangsa. Pada derkade 50 an, NU mengecam gerakan sparatis berlabel agama DII/TII di Jawa Barat, PPRI/Permesta, maupun pemberontakan kahar muzakkar di sulawesi selatan yang ingin memecah NKRI. Demi

⁹¹ Tim penyusun, *Jejak Masyayikh an Nuqoyyah*, (Guluk-Guluk Sumenep: BPMA, 2004), 11.

⁹² A. Efendy Choiric, “*Pelopop Gerakan Kebangsaan, Rapuh di Ekonomi*”, www.gp-ansor.org. diakses pada , 2 Januari 2014

⁹³ Martin van Bruinessen, *Resolusi Jihad NU*, hal 303

menjaga legitimasi pemerintahan, dalam keadaan genting, NU Pada 1953 memberi gelar kepada Soekarno dengan gelar *waliyyul amri al-Dlaruri bi as-Saukah*, sebuah pengakuan keabsahan kekuasaan nasional dari sudut pandang agama⁹⁴.

c. Nahdlatul wathan

Berarti kebangkitan tanah air. Ini merupakan berbentuk lembaga pendidikan yang dibangun oleh KH. Wahab Hasbullah dengan mas Mansoer, seorang akitifis yang pernah menempuh pendidikan di Kairo. Nahdlatul wathan adalah lembaga pendidikan yang bercorak nasionalis moderat yang didirikan pada 1914. Pada tahun 1916, lembaga ini kemudian dikembangkan oleh KH. Wahab Hasbullah yang dengan mendirikan madrasah Nahdlatul wathan dengan gedung yang megah dan bertingkat di Surabaya. Yang kemudian beliau membentuk organisasi Jam'iyah Nashihin (organisasi pada da'i)⁹⁵.

Nahdlatul wathan merupakan salah satu emberio berdirinya NU juga didorong oleh patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Melalui lembaga pendidikan Nahdlatul wathan ini, pendidikan kesadaran tanah air dan nasionalisme dibangun. Berkembangnya lembaga pendidikan ini dapat dirasakan sesudah itu yakni dengan berdirinya organisasi

⁹⁴ Zainal Abidin Amir dan Imam Anshori Saleh, *NU dan Soekarno*, 76.

⁹⁵ Ahmad Zahro, *Lajnah Batsul Masa'il 1926-1999; Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 16.

subbanul wathan (pemudah tanah air) disitu pemuda didik hingga memiliki jiwa intelektualitas dan nasionalisme yang militan demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa⁹⁶.

d. Nadlatut Tujjar

Pada tahun 1918, KH. Wahab Hasbullah mendirikan nahdlatut tujjar, yaitu organisasi wirausahawan yang berarti kebangkitan pedagang. Maksud dari pendirian organisasi ini jelas untuk membangkitkan ekonomi masyarakat islam tradisional yang secara umum masih sangat miskin⁹⁷. Hal ini dilakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa berwiraswasta sangat penting. Kemudian organisasi ini dikembangkan dalam bentuk koprasia perdagangan untuk memperlancar perekonomian berbasis usaha dagang dan pertanian tradisional.

e. Taswirul afkar

Dalam rangkai mengokohkan sendi sendi epestemologis cara pandang islam tradisional yang progresif dan moderat, menjelang 1919 didirikan madrasah taswirul afkar. Madrasah ini terletak di Ampel surabaya. Untuk mendidik mereka agar menjadi intelektual yang luas ilmunya. Kelak, generasi ini dipersiapkan untuk membentengi pandangan negatif terhadap umat islam tradisional.

⁹⁶ *Ibid.*, 21

⁹⁷ *Ibid.*

C. Keputusan NU dalam Hal Kebijakan

Sejak awal sebelum indonesia merdeka NU telah mengambil posisi yang terintegrasi dengan rakyat dan bangsa indonesia. Untuk mewujudkan indonesia merdeka dari penjajahan kolonialis bentuk perjuangan yang terintegrasi tersebut adalah dengan mendirikan wadah nahdlatul wathan (kebangkitan bangsa). Dengan para pemudah dan segenap warga NU ikut serta menyadarkan bangsa indonesia untuk merdeka dari cengkeraman belanda.⁹⁸

NU dalam melawan penjajah mengutamakan kesatuan bangsa dari pada menonjolkan dari sisi keagamaanya. Dalam hal internal agama islam NU memandang negara yang dikuasai oleh hindia belanda adalah dar assalam (negara damai) walaupun pemimpin pemerintahan adalah orang orang kafir, namun umat islam masih dapat menjalankan aqidah dan agamanya masing masing. Hal ini berbeda dengan jika pemerintah hindia belanda melarang kepada umat islam dalam menjalankan agamannya. Maka mungkin saja NU menetapkan indonesia ini dengan status dar al harb (negara perang).

Dalam percaturan politik, NU mempunyai 9 (sembilan) Pedoman Politik Warga NU. Nahdlatul Ulama (NU) memang sulit dipisahkan dari dunia politik, karena organisasi ini sudah puluhan tahun berkuat di dalamnya. Namun berpolitik menurut NU memiliki kriteria dan tujuan sendiri, bukan dilakukan dengan segala cara hanya sekedar untuk meraih kekuasaan. Dalam Mukhtamar

⁹⁸ *Ibid.*, 32

ke-28 di Yogyakarta (1989) dirumuskan 9 (sembilan) Pedoman Politik Warga NU, yaitu garis-garis pedoman untuk melangkah bagi kaum Nahdliyin yang menerjuni dunia politik dengan tetap menjunjung tinggi Khittah Nahdlatul Ulama. Di lingkungan NU juga dikenal istilah Politik Kebangsaan, Politik Kerakyatan kebangsaan. Berikut ini 9 Pedoman Politik Warga NU dimaksud:⁹⁹

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai aural ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang

⁹⁹ Masmuni, *NU 2 Versi, Dari Pergulatan Menuju Kejayaan*, 97.

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Ahlussunnah Waljamaah.
7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan di antara aspiran-aspiran politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Di sela-sela Mukhtamar NU ke-31 di Donohudan, Solo (2004), K.H. MA Sahal Mahfudz mengkategorikan politik NU menjadi tiga bagian:

1. Politik Kebangsaan, tujuannya membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Politik Kerakyatan, tujuannya membela rakyat.
3. Politik Kekuasaan, tujuannya mencari kekuasaan.

NU tidak boleh digunakan untuk mencari kekuasaan. Adapun warganya, tidak dilarang berpolitik, tapi ada aturan, etika dan pedoman, misalnya tidak boleh membawa institusi NU.